

OPTIMALISASI PERAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Ahmad Syakur

Jurusan Syariah STAIN Kediri
Jln. Sunan Ampel 7 Ngonggo Kediri
Email: ahmadsyakur08@gmail.com
HP. 08563604809

Abstrak

On the history of Islam education in Indonesia, the position of pesantren is undoubtful. Before the Islamic school established, for a long time pesantren has given the large contribution for education and building the human resource as quality and quantity. The pesantren with all of the strategic potential, reasonable to be pioneer of Islamic economy. In the other hand Islamic economy need pesantren to grow up. It is caused the pesantren is still being the Islamic education institute that is biggest influencing and being the central of 'ulama' education that is legitimized. Actually, the products of Islamic economy is the rich of pesantren, that is observed from fiqh muamalah in the yellow book (kitab kuning). In the head line, the influencing of pesantren in the Islamic economy are two. The first, the influencing of knowledge development; and the second is the influencing to appear the laboratory of sharia economic theory in the real activity. For being maximal the influencing of pesantren in the knowledge development in Islamic economy, is required to repair the curriculum, method and management of education. Beside it is required to repair the quality of human resource, growing interpreneur sense and repairing the management of work.

Keywoed: Optimalisasi, peran pesantren, ekonomi syariah

Pesantren merupakan khazanah pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, peran pesantren tak diragukan lagi. Sebelum sekolah dan madrasah bercokol, pesantren jauh-jauh hari telah memberikan kontribusi yang besar bagi pergumulan pendidikan dan pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara kualitas, pesantren telah melahirkan banyak tokoh berkelas nasional dan internasional. KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Tremas, dan KH. Nawawi Banten adalah sebagian dari tokoh pesantren yang telah berkiprah dan mengharumkan nama Indonesia. Sedang dari segi kuantitas, menurut data Depag tahun 2006 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 16.015 buah dengan santri mencapai 3.190.394 santri (Deden, 2007). Jumlah pesantren ini jauh lebih banyak dari

jumlah SMA seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta yang pada tahun 2007/2008 berjumlah 10.239 buah, namun dari segi jumlah siswa SMA lebih banyak dari pesantren, yang mana jumlah total siswa SMA pada tahun 2007/2008 adalah 3.758.893 siswa (depdiknas, 2009).

Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah. Disisi lain kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat memerlukan peran pesantren. Hal ini karena sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama' dan dai yang legitimed di masyarakat. Apalagi sebenarnya produk-produk ekonomi syariah adalah kekayaan pesantren, yang digali dari fiqh muamalah dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Seharusnya para santri lebih memahami ekonomi syariah daripada yang lain karena mereka sehari-hari bergelut dengan keilmuan syariah.

Namun realitasnya peran pesantren dalam ekonomi syariah belum optimal, bila tidak dikatakan minim. Diantara ribuan pesantren di Indonesia hanya segelintir saja yang memasukkan materi ekonomi syariah dalam kurikulumnya, itupun belum menjadi fokus kajian. Begitu juga pesantren yang secara profesional mengembangkan potensi ekonomi dengan mendirikan BMT, BPRS, koperasi syariah maupun lainnya juga minim. Kebanyakan masih dikelola dengan manajemen tradisional sehingga tidak maju. Hal inilah salah satu faktor lambannya perkembangan ekonomi syariah di tanah air.

Tulisan sederhana ini akan berupaya mengupas kendala-kendala yang dihadapi pesantren sehingga perannya dalam ekonomi syariah belum optimal serta berupaya memberi solusi dan pandangan untuk optimalisasi peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah tersebut.

PENGERTIAN DAN ASAL MULA PESANTREN

Istilah pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan *pe-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi kata *pe-santri-an*, kemudian berubah menjadi pesantren yang artinya adalah tempat para santri. Sedangkan istilah santri berasal dari kata shastra (i) dari bahasa Tamil India yang berarti ahli buku suci (Hindu). Dewasa ini istilah santri berarti peserta didik yang tinggal di asrama kecuali yang rumahnya dekat dengan pesantren (Bina Pesantren, 2006).

Istilah lain dari pesantren dan sering dipakai adalah pondok. Bahkan istilah ini di Jawa pedesaan lebih populer dan umum digunakan daripada istilah pesantren. Kata pondok berasal dari kata *funduq* dalam bahasa Arab yang berarti penginapan/hotel (Munawwir, 1997). Dalam prakteknya saat ini, dua kata tersebut (pondok dan pesantren) sering dijadikan satu menjadi pondok pesantren oleh masyarakat. Namun para penulis menganggap istilah pondok kurang pas, sedang istilah pondok pesantren tidak singkat-padat. Karena itu istilah pesantren lebih tepat. Secara sederhana pesantren adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya (Qomar, t.t).

Beberapa sumber dan literatur menunjukkan bahwa istilah pendidikan pesantren, menurut corak dan bentuknya yang asli adalah suatu sistem pendidikan yang berasal dari India. Pesantren pada mulanya, sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, adalah sistem pendidikan yang digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu dan Budha. Oleh karena agama Hindu dan Budha telah lebih dulu masuk dan berkembang di Nusantara, maka setelah Islam masuk dan tersebar di wilayah ini, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Namun sebagian ahli membantah pendapat ini, mereka menyatakan walaupun kata pesantren berasal dari India, namun sistem pendidikan tersebut juga ditemukan dalam tradisi Islam di Timur Tengah, seperti Baghdad dengan *al-Nidhamiyah* dan Mesir dengan *al-Azharnya* (Steenbrink, 1994).

Sebagian sumber menyebutkan bahwa pesantren Islam pertama di Indonesia didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim. Menurut Ronald Alan Lukens Bull, sebagaimana dikutip oleh Muhtarom, syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren pada tahun 1399 M. (Muhtarom, 2005). Sedang M. Said dan Junimar Affan menyebut Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai pendiri pesantren pertama di Indonesia. Bahkan ada ulama yang menganggap Sunan Gunung Jati sebagai pendiri pesantren pertama (Qomar, t.t). Walau demikian, mengingat ketiga tokoh yang diperselisihkan sebagai orang pertama yang mendirikan pesantren diatas rentang waktu kehidupan mereka tidak terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa pesantren telah ada sejak sekitar 600 tahun yang lalu. Usianya yang panjang ini sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa pesantren telah menjadi milik budaya bangsa dalam bidang pendidikan.

PERAN PESANTREN DALAM EKONOMI SYARIAH.

Secara garis besar, peran strategis pesantren dalam ekonomi syariah ada dua. *Pertama* peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang *legitimed* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama' ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga dapat menjelaskan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Secara terperinci, Agustianto menyebutkan delapan peran yang dapat dilakukan oleh ulama dan pesantren dalam sosialisasi dan pengembangan ekonomi syariah, yaitu: *Pertama*, berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah maliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam. *Kedua*, berperan menjelaskan bahwa keterpurukkan ekonomi umat Islam selama ini di antaranya disebabkan karena umat Islam mengabaikan fiqh muamalah. Kitab Ihya 'Ulumuddin Al-Ghazali, misalnya hanya digali aspek tasawufnya saja, sedangkan aspek ekonominya tidak dikaji dan dikembangkan. Demikian pula ratusan judul kitab-kitab fiqh lainnya. *Ketiga*, berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah pengamalan fiqh muamalah maliyah, fiqh ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis dan keuangan. *Keempat*, mengembalikan masyarakat pada fitrahnya. Menurut fitrahnya, baik fitrah alam dan maupun fitrah usaha, umat Islam adalah umat yang menjalankan syariah dalam bidang ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, investasi dan perkebunan, dsb. Budaya demikian, kata Syafi'i Antonio, telah dirusak oleh liberalisasi dunia perbankan, sehingga masyarakat tercemari oleh budaya bunga yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah alam dan fitrah usaha. Fitrah alam dan fitrah usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil, karena sebuah usaha bisa untung besar, untung kecil, malah bisa rugi. Sedangkan dalam konsep bunga usaha dipastikan berhasil. Padahal yang bisa memastikan hanya Allah swt. *Kelima*, berperan

menjelaskan kepada ummat keunggulan-keunggulan sistem ekonomi Islam, termasuk keunggulan sistem bank syariah dari bank konvensional yang menerapkan bunga. *Keenam*, berperan membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui perkembangan dan sosialisasi perbankan syariah. Krisis ekonomi di penghujung dekade 1990-an menjadikan perekonomian bangsa mengalami kehancuran. Suku bunga terpaksa dinaikkan, agar dana masyarakat mengalir ke perbankan sebagai tambahan darah bagi kehidupan bank. Namun, ternyata kebijakan itu semakin memperparah penyakit perbankan. Perbankan mengalami negative spread akibat bunga yang dibayar lebih tinggi dari bunga yang didapat. Kenyataan ini terjadi pada semua bank konvensional, sehingga sebagiannya terpaksa tutup (likuidasi), sebagian lagi dapat rekapitulasi dalam jumlah besar (ratusan triliun rupiah dari pemerintah dalam bentuk BLBI). Bila ulama berhasil mengajak bangsa untuk kembali ke pangkuan syariah, insya Allah, perbaikan ekonomi bangsa, melalui institusi perbankan syariah dapat terobati dan sehat. *Ketujuh*, mengajak umat untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan, tidak sepotong-potong seperti selama ini. *Kedelapan*, menjelaskan kepada masyarakat tentang dosa riba yang sangat besar, baik dari nash Al-Qur'an, sunnah, pendapat para filosof Yunani, pakar non muslim, pakar ekonomi Islam, dsb. *Kesembilan*, memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya para pengusaha kecil, menengah atau wirausaha, agar mereka memiliki etos kerja yang sangat tinggi, bekerja keras sesuai dengan ridha Allah dan bersifat jujur (amanah) dalam mengelola uang umat. *Kesepuluh*, mengajak para hartawan dan pengusaha muslim agar mau mendukung dan mengamalkan perbankan syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, syiar muamalah Islam melalui perbankan syariah lebih berkembang dan diminati seluruh kalangan (Agustianto, 2009).

Sedang peran pesantren *kedua* adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat untuk beralih ke dalam ekonomi syariah dalam beraktivitas sehari-hari. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Sebenarnya peran pesantren dalam mewujudkan laboratorium ekonomi syariah sangat potensial diwujudkan. Ada beberapa potensi ekonomi pesantren yang selama ini belum diberdayakan dengan baik. Beberapa potensi tersebut antara lain; *Pertama*, pesantren memiliki pasar fanatik (*captive market*), yaitu santri, ustadz dan masyarakat di lingkungan pesantren. Pasar ini sangat potensial untuk berbagai sektor riil seperti kantin, toko serba ada untuk kebutuhan sehari-hari, toko buku dan lain-lain. Aneka usaha ini dapat dikembangkan secara terpadu di bawah naungan kopontren yang berbentuk koperasi syariah maupun BMT.

Kedua, pesantren memiliki santri yang pada waktu-waktu tertentu melakukan pembayaran untuk membantu operasional pesantren, seperti syahriyah, maunah dan lain-lain yang potensial untuk diperankan sebagai dana pihak ketiga bagi kopontren. Belum lagi potensi tabungan dari santri mukim yang kadang dikirim beberapa bulan sekali. Daripada disimpan dalam almari, lebih baik disimpan dalam kopontren dalam bentuk wadiah maupun mudharabah.

Ketiga, jaringan santri, masyarakat sekitar, alumni dan orangtua wali santri yang memiliki aneka usaha, pekerjaan dan berbagai latar belakang yang terjalin kuat sangat potensial sebagai jaringan pemasaran usaha koperasi pesantren (KOPONTREN). Adanya hubungan emosional antara mereka dengan pesantren dapat diarahkan ke arah pengembangan ekonomi untuk memajukan pesantren (Fauroni, 2007).

Keempat, potensi wakaf dari masyarakat. Wakaf telah lama menjadi sarana pengembangan pendidikan Islam, terutama pesantren. Hanya saja untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut pesantren perlu mengembangkan wacana wakaf produktif, yaitu wakaf yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif seperti pembangunan toko dan lahan pertanian untuk mendukung keberadaan lembaga pesantren.

Namun, realitasnya kebanyakan pesantren belum mampu memberdayakan potensi yang mereka miliki tersebut.. Diantara 16.015 pesantren pada tahun 2006, hanya 444 pesantren (2,77%) saja yang memiliki BMT. Ironisnya jumlah tersebut justru menurun dari tahun sebelumnya (2005) yang mencapai 492 pesantren, padahal jumlah pesantren pada tahun tersebut hanya 14.798 buah. Begitu juga dengan jumlah KOPONTREN yang walaupun dari segi jumlah meningkat, namun prosentasenya menurun, yaitu 14,08% pada tahun 2005 menjadi 13,23% pada tahun 2006 (Deden,

2008). ini berarti banyak usaha BMT di pesantren yang gulung tikar atau macet, dan pertumbuhan KOPONTREN belum sebanding dengan pertumbuhan pesantren.

Padahal potensi ekonomi pesantren tersebut sangat besar, jika dikelola dengan profesional akan melahirkan kekuatan ekonomi yang dahsyat. sayangnya hanya segelintir pesantren saja yang berhasil mengembangkan potensi ekonominya, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor dan PP Sidogiri Pasuruan. Sebagai contoh, Pesantren Sidogiri berhasil mengembangkan Koperasi BMT Masalah Mursalah lil Ummah (MMU) dari modal awal 13 juta pada tahun 1997 menjadi 20 Milyar lebih pada tutup tahun 2006 dengan laba bersih lebih dari 1 milyar. Dengan hasil ini BMT MMU ditetapkan sebagai koperasi berprestasi peringkat 1 tahun 2006 tingkat Jawa Timur dalam kategori simpan pinjam dan ditetapkan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2006 (Fauroni, 2007).

URGENSI OPTIMALISASI PERAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Optimalisasi peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah merupakan kebutuhan bersama. Ia adalah kebutuhan ekonomi Islam dan pesantren itu sendiri, bahkan ia merupakan kebutuhan umat Islam secara keseluruhan.

Di satu sisi optimalisasi peran pesantren ini merupakan kebutuhan ekonomi syariah agar lebih cepat memasyarakat, berkembang dan diterima sebagai alternatif sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam. Pondok pesantren merupakan lembaga yang berperan dalam perubahan di masyarakat. Saat ini, posisi Kyai dan pesantren sangat menentukan. Budaya masyarakat tradisional adalah sangat tergantung dengan sosok seorang kyai. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam pengembangan ekonomi syariah dengan melibatkan para Kyai. Karena jika Kyainya sudah berkenan, maka akan diikuti oleh pengikutnya. Selama ini kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan bisnis syariah kurang karena minimnya peran pesantren di dalamnya.

Ekonomi syariah juga membutuhkan SDM yang memahami fiqh muamalah secara komprehensif agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktek. Problem ekonomi syariah saat ini adalah bahwa ia dikembangkan oleh kalangan yang belum sempurna pemahamannya dengan tradisi dan istilah kunci bahasa Arab yang melekat di dalam fiqh muamalah, sehingga rapuh dalam teoritis. Dalam perbankan syariah

banyak praktisi yang kadang tak bisa membedakan sistem riba dan sistem syar'i. Akibatnya, banyak tuduhan yang mengatakan bahwa sistem perbankan syariah hanya kedok saja agar nasabah tidak lari. Satu sisi pernyataan ini betul, karena memang sistem ini lagi digandrungi oleh banyak negara di dunia saat ini. Bahkan, sistem ini dipakai oleh kalangan non muslim di Eropa dan Amerika. Tapi di sisi lain, pernyataan di atas muncul karena tidak adanya pemahaman teoritis yang utuh tentang sistem ekonomi syariah.

Sedang di sisi lain optimalisasi ini merupakan kebutuhan pesantren. Dalam pengembangan studi keislamannya agar tetap eksis dan *uptodate*, maka pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi pengajaran fiqh muamalah yang lebih mengarah kepada aktivitas ekonomi syariah kontemporer. Jika tidak, maka pesantren akan ketinggalan dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Pesantren juga membutuhkan optimalisasi pengembangan potensi ekonominya. Hal ini karena semua pesantren di Indonesia adalah lembaga swasta, dimana kemandirian menjadi salah satu ciri utamanya. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesantren akan berpengaruh positif pada citra dan minat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren tersebut. Kemandirian pesantren dalam ekonomi, berpengaruh positif pada kemandirian kelembagaan dari infiltrasi dan pengaruh politik penguasa dan kaum kapitalis. Apalagi jika pemberdayaan ekonomi pesantren itu bisa mengantarkan kepada biaya pendidikan yang murah namun berkualitas, tentu akan menjadi solusi bagi masyarakat kecil dalam pendidikan anak-anak mereka.

Pada umumnya ekonomi pesantren bertumpu pada dana sosial kemasyarakatan, seperti zakat, infaq, shodaqah dan wakaf. Akibatnya, muncul image bahwa pesantren adalah lembaga sosial yang layak dibantu secara ekonomi. bahkan ada pesantren yang menyebarkan santri-santrinya untuk mencari sumbangan ke masyarakat. Hal ini tidak seluruhnya keliru, tetapi kadang disalahgunakan pihak tertentu dengan atasnama pembangunan pesantren, juga di sisi lain mengajarkan santri untuk meminta-minta, padahal Islam mengajarkan tangan di atas (memberi) lebih baik dari tangan di bawah (meminta). Bahkan kondisi ini menjatuhkan harga diri umat Islam itu sendiri.

Kelemahan ekonomi pesantren juga berakibat ketergantungan mereka kepada

penguasa dan pengusaha. Pada masa orde baru muncul identitas pesantren-pesantren pendukung Golkar dikarenakan bantuan-bantuan dari pemerintah yang diatasnamakan partai. Sedang pada masa reformasi ini banyak pesantren dan kyai yang terlibat dukung-mendukung parpol, caleg dan capres karena bantuan yang diberikan kepada mereka, bukan karena ideologi. Tak jarang antar pimpinan pesantren satu dengan lainnya berbeda pendapat bahkan berselisih secara tajam karena perbedaan kepentingan politik. Tentu hal ini menjadikan kemandirian pesantren menjadi ternoda.

Ketergantungan pesantren baik secara sosial ekonomi maupun politik di atas, dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi pesantren. Bahkan, kemandirian ekonomi menjadikan pesantren dapat melakukan *bargaining position* dengan pihak manapun, termasuk partai dan pemerintah mengenai berbagai hal demi kepentingan agama dan masyarakat.

Terakhir, optimalisasi peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah merupakan kebutuhan umat Islam secara keseluruhan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, harus ikut serta membangkitkan ekonomi umat yang sampai saat ini masih terpuruk. Kalau diperhatikan ukuran umum yang digunakan untuk mengukur kinerja manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, maka dapat dikatakan di dunia saat ini tidak satupun negara Islam yang pencapaiannya mendekati pencapaian negara-negara maju non-Islam. Pada tahun 1999, dari 165 negara di dunia, tidak satupun negara Islam mendekati posisi negara-negara maju. Yang tertinggi pencapaiannya adalah Brunei Darussalam pada posisi no. 32. Yang terendah dikalangan negara Islam adalah Niger dengan posisi 161. Negara-negara Islam berpenduduk besar seperti Indonesia, Mesir, Maroko, Pakistan dan Bangladesh berada pada posisi yang jauh lebih rendah yaitu masing-masing 102, 105, 112, 127 dan 132. Rendahnya indeks pembangunan manusia berarti manusia-manusia Muslim jauh tertinggal pendidikannya, tingkat kesehatannya, dan tingkat kemampuannya dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Jepang (Hasibuan, 2007). Untuk angka kemiskinan Indonesia, menurut pemerintah pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%) (tpkri, 2009), dan angka tersebut mayoritas adalah muslim.

Penguatan peran ekonomi pesantren secara otomatis akan berpengaruh positif

bagi perbaikan ekonomi umat Islam, dan perbaikan kualitas pendidikan pesantren akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan mereka. Hal ini karena lembaga pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang legitimed di masyarakat. Dan pesantren adalah lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil dan kaum miskin di pedesaan.

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PERAN PESANTREN.

Pembaruan Sistem Pendidikan Pesantren

Peran pesantren yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan adalah menjadikan pesantren sebagai pusat kajian fiqh muamalah kontemporer. Dalam hal ini pesantren telah punya modal besar, yaitu bahwa kajian keilmuan pesantren (kitab kuning) lebih didominasi kajian kitab fiqh yang termasuk di dalamnya fiqh muamalah. Sayangnya kajian tersebut di dominasi fiqh ibadah di satu sisi, dan di sisi lain kajian tersebut tidak membumi. Eksistensi ilmu teoritis fiqh muamalah di pesantren seharusnya *down to earth* menyelesaikan problem-problem transaksi yang bersih dan syar'i di lapangan. Namun kebanyakan insan pesantren tak berdaya manakala berhadapan dengan sistem kapitalis yang membelit seperti sistem riba. Perbankan konvensional misalnya, sebelum adanya sistem perbankan syariah, ia seakan tak bisa dihindari oleh kebanyakan umat Islam, termasuk para santri yang sejatinya pakar tentang teori fikih muamalah tersebut. Bahkan, akibat membelitnya sistem kapitalis itu, tak sedikit ulama yang melegitimasi sistem riba di perbankan konvensional dengan dalil-dalil yang dikutip dari kitab-kitab kuning.

Ketidakterdayaan pesantren tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, Kajian keilmuan pesantren (termasuk fiqh muamalah) hanya merujuk dan bersumber dari kitab-kitab klasik yang ditulis pada ratusan tahun yang lalu, sedikit pesantren yang mau menggunakan kitab-kitab kuning kontemporer, padahal institusi dan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Banyak hal-hal baru dalam perkembangan ekonomi yang tidak dibahas di dalamnya, sehingga menyebabkan keilmuan santri dalam fiqh muamalah mengalami kemandegan, sehingga tidak memahami realitas yang ada. *Kedua*, teori-teori fiqh muamalah kurang diaktualkan menyebabkan orang tidak lagi familiar dengan konsep-konsep yang dibawa dari kitab kuning. Semestinya, pesantren mampu membawa teori-teori klasik itu dalam dunia saat ini dengan bahasa yang kontemporer, sehingga ada upaya untuk

membumikan konsep “abstrak” itu ke dunia nyata yang kongkret. *Ketiga*, proses belajar-mengajar yang dikembangkan masih berorientasi pada bahan atau materi, bukan pada tujuan. Proses pembelajaran dianggap berhasil bila para santri sudah menguasai betul materi-materi yang ditransfernya dari kitab kuning dengan hafalan yang baik. Apakah mereka nanti mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan materi-materi tersebut ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat tidak diperhatikan. *Keempat*, metode mengajar cenderung monoton dan menggunakan pendekatan doktrinal, sehingga kreatifitas keilmuan santri minim (Wahid, 1999). *Kelima*, santri tidak dikenalkan atau tidak dipahamkan tentang sistem ekonomi konvensional, sehingga begitu berbenturan dengan sistem konvensional di lapangan langsung tak paham dan akhirnya menyerah dan tak berani mengusiknya. Ini terjadi karena sistem pendidikan pondok pesantren yang tidak memberikan porsi bagi materi-materi kontemporer (kekinian) dan keindonesiaan, termasuk materi ekonomi konvensional dalam kacamata Islam (Dimiyati, 2008).

Kelima penyebab di atas diperparah dengan pemahaman yang salah oleh banyak kalangan santri dan pesantren tentang dikotomi ilmu dunia dan ilmu agama. Walaupun dikotomi tersebut merupakan pengaruh sekulerisme, namun ia amat populer dikalangan pesantren, terutama dikalangan pesantren tasawuf. Akibatnya santri malas atau bahkan tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu dunia, termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. padahal kalau kita melihat al-qur’an, hadits dan sejarah ulama’ salaf, dikotomi tersebut tidak dikenal. Semua ilmu - baik ilmu dunia maupun ilmu agama - mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan pemiliknya takut kepada Allah. Kalau kita melihat kata ulama’ dalam al-Qur’an tidak hanya merujuk kepada ahli ilmu agama semata, tetapi juga ahli ilmu alam (QS: 35: 27-28)

Upaya pemecahan mendasar dari kondisi ini adalah dengan pembaruan sistem pendidikan pesantren. Pembaruan dan perubahan adalah hal yang wajar dan bahkan suatu keharusan bagi segala sesuatu, karena kehidupan manusia yang terus berkembang dan berubah. Pembaruan secara berkala sangat diperlukan oleh pesantren. Jika tidak ada upaya ini, maka optimalisasi peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah tidak akan terealisasi. Output pesantren akan sulit diandalkan untuk menjadi SDM-SDM ekonomi syariah yang berkualitas dan berkapasitas syar’i. pembaruan sistem pendidikan pesantren ini meliputi:

Pembaruan dan peninjauan kembali kurikulum pendidikan

Pembaruan kurikulum pendidikan adalah suatu keharusan. Sebagai sebuah sistem, Islam mengandung muatan-muatan yang dibedakan dalam dua kategori. Pertama adalah ajaran dasar yang menjadi referensi bagi landasan hidup dan penyelesaiannya dalam mengatasi problematikanya. Ajaran dasar ini mempunyai nilai kebenaran mutlak dan muatan nilai universal yang mempunyai daya relevansi dalam segala tataran ruang dan waktu. Ajaran ini telah tuntas dikodifikasikan oleh para *salafuna al-salih* berupa al-Qur'an dan al-Hadith. Kategori kedua adalah ajaran bukan dasar yang merupakan hasil interpretasi dan derivasi dari ajaran dasar. Ajaran ini mengelaborasi muatan ajaran dasar dengan kecenderungan pada aspek-aspek praktis-aplikatif yang terbingkai dalam batasan ruang dan waktu. Karena ajaran ini lahir sebagai anak dari proses perubahan, maka kualitas jangkauannya tidak mampu menjawab segala perubahan, apalagi perkembangan kontemporer. Semua kitab kuning non-hadith masuk dalam kategori kedua ini, termasuk tafsir dan syarah hadith (Wahid, 1999).

Berdasar paparan di atas kitab kuning klasik tidak bisa menjawab semua problematika ekonomi kontemporer, sehingga diperlukan kitab-kitab *mu'asirah*, kitab-kitab karya ulama' kontemporer. Jika tidak, maka pola pikir pesantren dan santri - sebagaimana dikatakan Yusuf al-Qardhawi - berdasar pola pikir ulama yang hidup ratusan tahun lalu, padahal kita hidup pada saat ini. Dalam kajian fiqh, disamping menggunakan kitab fiqh klasik, seharusnya juga menggunakan kitab fiqh kontemporer. Disamping mengkaji akad-akad muamalah klasik, agar kajian fiqh muamalah dipesantren membumi, maka juga diperlukan kajian aplikasi kontemporer atas akad-akad tersebut. Juga diperlukan kajian fiqh atas fenomena dan realitas kontemporer yang belum ada dalam kitab-kitab kuning, berdasarkan perangkat yang telah disediakan oleh Islam, yaitu metode usul fiqh, agar kehidupan kita berada dalam naungan syariah.

Bagi pesantren yang hendak menjadikan bidang syariah (fiqh) sebagai *takhosus* (spesialisasi), hendaknya memberikan porsi yang cukup bagi kajian usul fiqh. Biasanya kajian usul fiqh di pesantren sangat minim. Hal ini perlu diperbaiki mengingat usul fiqh merupakan alat untuk menggali hukum dan merupakan sarana untuk menyambungkan teks-teks syariah yang terbatas dengan problematika dan kejadian-kejadian masyarakat yang tidak terbatas dan terus bertambah. Kekurangan

pemahaman usul fiqh inilah yang menjadikan santri kurang bisa mengambil hukum hal-hal baru. Dalam bidang ekonomi muncul kerancuan ketika para santri setiap kali berhadapan dengan fenomena dan permasalahan ekonomi kontemporer selalu merujuknya ke kitab fiqh klasik (kitab kuning). Kebingungan muncul ketika dalam kitab-kitab fiqh tersebut tidak ditemukan isyarat atau teks tentang problem tersebut. Dan jikapun ditemukan isyarat atau teksnya dalam kitab kuning, menerapkan langsung teks tersebut dalam problem ekonomi kekinian adalah rentan tidak berpihak kepada realita, yang pada gilirannya menjadikan fiqh muamalah tidak membumi. Hal ini karena bagaimanapun kitab fiqh klasik adalah produk ijihad pemikiran dan kondisi masa lalu.

Pesantren juga hendaknya memperluas kitab kajiannya tidak hanya terbatas kepada fiqh madzhab Syafi'i. keterkungkungan dalam satu madzhab bertentangan dengan ruh Islam itu sendiri. Apalagi, realitasnya fiqh madzhab syafi'i dalam bidang muamalah cenderung lebih kaku dari madzhab lainnya. Banyak pendapat fiqh syafi'i yang tidak bisa atau sulit untuk diterapkan dalam ekonomi kontemporer. Itulah mengapa dalam kajian ekonomi Islam (syariah) pendapat-pendapat madzhab Hanafi dan Hambali lebih banyak dipakai. Hal ini sekaligus menjadikan kajian fiqh perbandingan dan lintas madzhab urgen diadakan di pesantren.

Untuk mempermudah pemahaman dan memperkaya khazanah keilmuan, pesantren perlu membuka diri untuk buku-buku berbahasa Indonesia. Buku-buku tersebut penting untuk membekali santri akan kondisi ke-Indonesia-an dan lokal, yang dalam banyak hal aplikasi akad muamalah klasik menemukan bentuk dan obyek yang berbeda. Banyak istilah ekonomi kontemporer yang asing bagi santri, jangankan istilah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saja mereka asing, sehingga diperlukan buku penunjang untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut.

Kurikulum pesantren juga harus membuka diri dengan disiplin-disiplin ilmu baru yang menunjang pemahaman dan aplikasi syariah kontemporer. Diantara disiplin ilmu yang penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pesantren adalah ilmu ekonomi Islam, atau yang lebih spesifik yaitu ilmu perbankan syariah. Kajian fiqh kontemporer saja tidak cukup untuk menjadikan santri memahami ekonomi syariah, masih diperlukan beberapa ilmu lain. Bahkan, untuk pemahaman yang komprehensif, diperlukan kajian perbandingan sistem ekonomi Islam dan konvensional.

Disamping itu pelajaran *life skill* juga penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan pesantren agar outputnya bisa hidup mandiri, membuat lapangan pekerjaan sendiri dan mengembangkan ekonominya dari pelajaran yang diperoleh di pesantren. Mengingat ilmu-ilmu agama yang dipelajari di pesantren tidak berorientasi market di lapangan. Sedikit sekali lapangan pekerjaan yang terbuka bagi santri baik PNS, karyawan swasta, maupun lainnya. Apalagi jika pesantren tersebut tidak membuka madrasah formal, MI, MTs, dan MA, ijazah menjadi permasalahan tambahan. Serapan terbesar alumni pesantren adalah menjadi guru agama, ustadz/ah TPQ dan madrasah diniyah, yang ironisnya lapangan tersebut minim input keuangan, sehingga diperlukan usaha lain. Sehingga jika pesantren tidak membuka program *life skill* ini, maka banyak output pesantren yang menganggur dan berada dibawah garis kemiskinan.

Pendidikan pesantren juga harus ikut menanamkan jiwa wirausaha / *entrepreneurship* kepada para santri. Ulama adalah pewaris nabi, begitu juga pesantren pewaris nabi dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. etos ekonomi dan bisnis pada dasarnya merupakan pelajaran pertama yang diperankan Rasulullah saw sejak muda dan diperkuat ketika diangkat menjadi rasul. Rasulullah selalu mendorong umatnya untuk bekerja, berkarya dan berwirausaha walaupun minim ketrampilan. Beberapa hadits berikut merupakan sedikit contoh bagaimana Rasulullah saw mendorong umatnya untuk memperkokoh etos ekonomi dan jiwa *entrepreneurship*.

"Tidak seorangpun memakan makanan yang lebih baik daripada apa yang ia makan, kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri". (HR. Bukhari).

"Sesungguhnya hal paling baik yang seseorang makan adalah yang datang dari hasil usahanya sendiri..." (HR. Al-Turmudzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah).

Pembaruan metode pembelajaran Pesantren

Selain kurikulum, metode pembelajaran juga harus diperbaiki. Metode pembelajaran *sorogan* dan *bandongan* yang cenderung monoton dan pasif, mesti ditransformasikan dan diperkaya dengan berbagai metode instruksional modern agar lebih mendekatkan kepada pemahaman, lebih menyenangkan dan lebih membuka eksplorasi cakrawala pemikiran peserta didiknya (Wahid, 1999). Apalagi metode pembelajaran pasif ini mempunyai kelemahan kecenderungan santri/siswa cepat

melupakan apa yang telah diberikan. Akibatnya kitab yang dikaji terbatas dan yang terbatas itu mudah hilang dari ingatan, sehingga ilmu yang terserap sangat minim.

Oleh sebab itu diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat ilmu yang baru diterima dari kyai atau ustadz. Metode pembelajaran aktif merupakan salah satu metode instruksional modern yang dapat digunakan untuk memperkuat keilmuan pesantren.. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak santri untuk belajar secara aktif, bukan hanya pendengar. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi kajian, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai banyak kelemahan. Kenyataan ini sesuai dengan kata mutiara yang diberikan oleh filosof Cina, Konfusius, yang menyatakan:

Apa yang saya dengar, saya lupa

Apa yang saya lihat, saya ingat

Apa yang saya lakukan, saya paham (Zaini, 2002)

Begitu juga metode pembelajaran berbasis kitab perlu diperkaya dengan metode pembelajaran berbasis tema /kajian tematik. Hal ini untuk memperkuat pemahaman dan ingatan dalam masing-masing tema juga untuk memperluas wawasan santri yang tidak hanya berkutat pada kitab yang dikaji. Dalam kaitan dengan ekonomi syariah diperlukan kajian tematik tentang bab-bab fiqh muamalah yang dalam kajian tersebut mengakomodasi berbagai pandangan ulama' dan madzhab juga mengakomodasi pembelajaran aplikasi kontemporer bab tersebut.

Perbaikan manajemen pendidikan pesantren

Perbaikan manajemen pendidikan pesantren penting dilakukan mengingat proses keberhasilan sistem pendidikan pesantren sangat dipengaruhi oleh penataan manajerialnya. Perbaikan manajemen ini mencakup manajemen kepegawaian dan manajemen santri.

Manajemen kepegawaian, termasuk didalamnya ustadz dan guru mutlak diperbaiki. Manajemen ini bertujuan bagaimana kualitas para ustadz selalu meningkat, karena salah satu penunjang kualitas pendidikan adalah kualitas ustadz/gurunya. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan peningkatan Kesejahteraan mereka adalah salah satu tugas manajerial pendidikan pesantren. Karena banyak pesantren

yang tidak layak secara ekonomis, para ustadz mengajar di sana hanya berbekal pengabdian dan *lillahi ta'ala*. Walaupun para ustadz tersebut tidak menuntut materi, namun kekurangan materi menyebabkan mereka tidak fokus mengajar dan juga tidak bisa meningkatkan kualitas keilmuannya.

Sedang manajemen santri selama ini pola yang diterapkan di mayoritas pesantren adalah cenderung dilakukan secara insidental dan kurang memperhatikan tujuan-tujuannya yang telah disistematisasikan secara hirarkis. Penerimaan santri baru misalnya, masih dilakukan secara terbuka untuk semua individu yang mempunyai latarbelakang dan kemampuan beragam tanpa mengadakan usaha pre-test dan pengelompokan kelas berdasar kemampuan (Wahid, 1999).

Hal urgen yang harus dilakukan oleh manajemen pendidikan pesantren untuk optimalisasi perannya dalam ekonomi syariah adalah melakukan program akreditasi atau legalisasi ijazah pesantren agar diakui oleh dunia akademisi dan *stakeholder* di luar pesantren. Ijazah adalah parameter yang sampai saat ini menjadi salah satu ukuran keilmuan seseorang. Karena itu, betapapun tingginya ilmu seseorang jika ia tidak mempunyai ijazah formal, maka dia tidak dapat memegang jabatan karena tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama telah memfasilitasi masalah ini dengan menyelenggarakan program *mu'adalah* (persamaan) bagi pesantren salaf dengan sekolah formal. Hal lain yang bisa dilakukan oleh pesantren adalah memformalkan pendidikannya ke dalam madrasah dan Perguruan Tinggi yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat.

Kerjasama dengan pihak luar juga merupakan suatu keharusan. Pola kerjasama simbiosis-mutualisme antara pesantren dengan institusi-institusi yang dianggap mampu memberikan kontribusi. Pola kerjasama ini dapat juga dilakukan dalam usaha pengembangan sumberdaya pesantren agar dapat memberdayakan diri dalam menghadapi realitas kontemporer yang semakin kompleks. Pesantren perlu bekerjasama dengan institusi dan lembaga-lembaga ekonomi syariah baik dalam sisi kontribusi keilmuan maupun dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesantren. Dalam segi keilmuan, lembaga seperti PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), MUI dan lainnya perlu untuk diajak kerjasama pengembangan ilmu ekonomi syariah di pesantren, sedang dalam bidang pemberdayaan bisa bekerjasama dengan Bank-bank syariah, BPRS, BMT dan lainnya.

Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pesantren

Pengembangan ekonomi pesantren disamping dimaksudkan untuk menopang kemandirian pesantren juga untuk menyiapkan kecakapan hidup bagi santrinya. Kesan bahwa santri hanya pintar mengaji dan berdoa dapat dijawab dengan bukti nyata. Kemandirian hidup dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan implementasi ajaran Islam yang dikaji di pesantren.

Pengembangan kemandirian santri sebenarnya telah lama berjalan di pesantren. Menurut Azyumardi dan Nurcholis Majid, sebagaimana dinukil oleh L. Fauroni dan Susilo P, sejumlah pesantren telah membiasakan model pendidikan ketrampilan yang menyatu dalam pendidikan pesantren. Pada masa kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pada dekade 1950-an dan 1960-an pembaharuan pesantren banyak diarahkan kepada pemberian pelatihan dan ketrampilan pertanian yang ditujukan sebagai bekal santri dan menopang ekonomi pesantren (Fauroni, 2007). Namun pengembangan potensi ekonomi pesantren tersebut sampai saat ini belum menjadi elan vital dan belum dikembangkan secara profesional oleh kebanyakan pesantren.

Optimalisasi pengembangan potensi ekonomi pesantren ini dapat dijalankan dengan beberapa langkah:

Pertama; Perbaiki SDM perekonomian, baik manajemen maupun akuntansi. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hal ini harus diadakan. Pesantren bisa menggandeng Lembaga Perekonomian Umat (LPU) yang sudah ada seperti Bank Syariah, BMT dan BPRS maupun Lembaga Pengembang Ekonomi Swadaya Masyarakat (LPESM) seperti INKOPONTREN dan PINBUK.

Kedua; perbaiki manajemen pengelolaan lembaga ekonomi menuju pengelolaan yang profesional dan berbasis syariah. Manajemen yang jelek merupakan faktor dominan bagi tidak berkembangnya ekonomi pesantren selama ini.

Ketiga; membangun jaringan, baik dengan LPU, LPESM, alumni, masyarakat maupun pemerintah. Jaringan Koperasi Pesantren melalui induknya (INKOPONTREN) yang sudah ada perlu dioptimalkan agar menciptakan multiefek yang besar, baik dibidang usaha maupun pemasarannya.

KESIMPULAN

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah mutlak diperlukan. Peran pesantren yang harus dioptimalkan tersebut secara garis besar adalah peran keilmuan dan peran pengembangan riil aktivitas ekonomi syariah. Dalam rangka optimalisasi peranan tersebut diperlukan beberapa langkah. Untuk mengoptimalkan peran pesantren dalam pengembangan keilmuan diperlukan perbaikan sistem pendidikan pesantren yang mencakup kurikulum, metode dan manajemen pendidikan. Hal ini agar pendidikan pesantren uptodate dan membumi.

Sedang untuk mengoptimalkan peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah diperlukan perbaikan kualitas SDM, penumbuhan jiwa wirausaha dan perbaikan manajemen amal usaha pondok pesantren yang profesional serta optimalisasi jaringan yang sudah ada seperti jaringan santri, wali santri, masyarakat dan INKOPONTREN, serta membentuk jaringan-jaringan baru baik jaringan produk maupun pemasaran, seperti membentuk jaringan dengan Bank Syariah, pemerintah (dinas Koperasi) dan lain-lain. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, *Optimalisasi Ulama Dalam Perbankan Syariah*.
<http://www.pesantrenvirtual.com>. (diakses tanggal 24 Oktober 2009)

Anwar, khoiril. *Evaluasi Awal Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2009*.
www.tpkri.org (diakses tanggal 4 Nopember 2009)

Bina Pesantren, 2006. Edisi 2 Nopember.

Al-Bukhari. 2006. *Sahih al-Bukhari*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr,

Dimiyati, Ahmad. *Ekonom Islam Berbasis pesantren Muncul Dari Madura*.
<http://masdimiyati.multiply.com>. diakses pada 24 Oktober 2009

Fauroni, L. dan Susilo P, 2007. *Menggerakkan Ekonomi Syariah Dari Pesantren*.
Yogyakarta: YP3Y,.

Hasibuan, Sayuti. 2007. *Umat Islam Dan Kinerjanya di Dunia Saat Ini*, dalam Buletin
Fakultas Ekonomi Univ. al-Azhar Indonesia, Vol. 2 No. 1, Juni

Majah, Ibn. 2004. *Sunan Ibn Majah*. hadits ke 2137, Vol 1 .Beirut: Dar al-Fikr,.

Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi: Resistansi Tradisional Islam*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif,.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*.
Jakarta: penerbit Erlangga, tt.

Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Cet. 2 Jakarta: LP3ES,

Wahid, Marzuki., dkk, (ed). 1999. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah,.

Zaini, Hisyam. dkk, 2002. *Strategi Pembelajaran aktif di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta:
CTSD IAIN Sunan Kalijogo,.

<http://dedenfaoz.wordpress.com/2007/12/21/statistik-pondok-pesantren>; (diakses
pada 24 Oktober 2009)

Tabel Perkembangan Jumlah Sekolah Negeri Dan Swasta Tiap Provinsi.
www.depdiknas.go.id (di-Download tanggal 4 Nopember 2009)

<http://dedenfaoz.wordpress.com/2008/01/03/jenis-usaha-pesantren-dan-kendala-pengembangan-ekonomi-pesantren/> (diakses tanggal 4 Nopember 2009)

<http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1513/203/lang,id>, (diakses tanggal 24 oktober 2009)